

**SKRIPSI**  
**GAMBARAN PENUNDAAN OPERASI ELEKTIF DI RSUP DR.**  
**M. DJAMIL PADANG TAHUN 2023**

Penelitian Manajemen Keperawatan

UNIVERSITAS ANDALAS



**YULLMARDIANA**  
**NIM. 2111316031**

**Pembimbing 1**  
**Dr. Yulastri Arif, S. Kp, M. Kep**  
**Pembimbing 2**  
**Ns. Mira Susanti, S.Kep, M.Kep**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS**  
**KEPERAWATAN**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**2023**

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FEBRUARI 2023**

Nama : Yuli Mardiana  
NIM : 2111316031

**GAMBARAN PENUNDAAN OPERASI ELEKTIF DI RSUP DR. M.  
DJAMIL PADANG TAHUN 2022**

**ABSTRAK**

Penundaan operasi elektif menunjukkan tidak efisien (*inefficiency*) dalam manajemen, karena penundaan berpotensi menjadi pembatalan operasi yang akan memperpanjang hari rawat pasien, waktu operasi yang tidak efisien, pemborosan dari sisi sumber daya manusia yang terlatih di kamar operasi, dan penggunaan kamar operasi yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran penundaan operasi elektif yang terjadi di RSUP DR M. Djamil Padang tahun 2022. Desain penelitian ini adalah metode deskriptif survei dengan sampel sebanyak 1,573 penundaan operasi elektif yang didapatkan menggunakan teknik *total sampling*. Alat penyimpulan data pada penelitian ini adalah lembar observasi yang memuat data pasien, waktu penundaan, jenis operasi dan alasan penundaan operasi elektif. Hasil penelitian menunjukkan persentase penundaan operasi elektif lebih dari 5% setiap bulannya, rata-rata penundaan operasi elektif setiap bulannya lebih dari 1 jam dan terdapat empat faktor yang dapat menjadi alasan penundaan operasi elektif yaitu faktor klinis (18.9%), faktor administrasi (9.3%), faktor sarana dan prasarana (26.3%) serta faktor sumber daya manusia (45.5%). Dapat disimpulkan bahwa penundaan operasi elektif di RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2022 masih melebihi Standar Pelayanan Minimum yang ada dan faktor yang paling banyak menjadi alasan penundaan adalah faktor sumber daya manusia.

**Kata Kunci :** Penundaan Operasi Elektif, Prevalensi, Standar Pelayanan Minimum

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA